



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Pasal 2

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

- (1) Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Bupati menghitung rincian Dana Desa setiap Desa.

- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah desa.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (6) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)\}*(DD - AD)$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa yang bersangkutan

DD = besaran Dana Desa

AD = besaran Alokasi Dasar

Pasal 3

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.
- (3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Mekanisme dan Tahapan Penyaluran

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan Dana Desa Tahap I dari RKD setelah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Desain dan RAB
 - b. Surat Permohonan Pencairan
 - c. Rekomendasi Camat
 - d. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pencairan Dana Desa Tahap II dari RKD setelah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I minimal 50% (lima puluh perseratus).
 - b. Surat Permohonan Pencairan tahap II
 - c. Rekomendasi Camat
 - d. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Camat memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa untuk memenuhi persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Desa.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun laporan realisasi Penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
 - a. Meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

BAB IV SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan minggu ke-3 bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 19 Pemotongan Penyaluran Dana Desa

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 20

Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2)

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bupati belum menetapkan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), perhitungan rincian Dana Desa setiap desa oleh Bupati dapat menggunakan IKG Desa tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Februari 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 9 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR
14

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2017

TATA CARA PENYUSUNAN
 INDEKS KESULITAN GEOGRAPIS DESA

No	Kecamatan	Desa	IKG
			Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4
1	TUNGKAL ULU	BADANG	33,83
2	TUNGKAL ULU	TANJUNG TAYAS	37,90
3	TUNGKAL ULU	KUALA DASAL	44,50
4	TUNGKAL ULU	PEMATANG PAUH	46,13
5	TUNGKAL ULU	TAMAN RAJA	32,25
6	TUNGKAL ULU	BRASAU	34,24
7	TUNGKAL ULU	GEMURUH	38,34
8	TUNGKAL ULU	PEMATANG TEMBESU	43,23
9	TUNGKAL ULU	BADANG SEPAKAT	63,56
10	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL I	41,70
11	TUNGKAL ILIR	TELUK SIALANG	32,21
12	PENGABUAN	PARIT PUDIN	33,50
13	PENGABUAN	SUNGAI SERINDIT	36,84
14	PENGABUAN	MEKAR JATI	49,23
15	PENGABUAN	SUNGAI PAMPANG	40,47
16	PENGABUAN	PARIT SIDANG	39,70
17	PENGABUAN	SUNGAI JERING	55,96
18	PENGABUAN	PARIT BILAL	60,26
19	PENGABUAN	SUAK SAMIN	50,41
20	PENGABUAN	SUNGAI BAUNG	42,13
21	PENGABUAN	KARYA MAJU	49,81
22	PENGABUAN	SUNGAI RAYA	56,42
23	PENGABUAN	PASAR SENIN	29,54
24	BETARA	PEMATANG LUMUT	20,22
25	BETARA	MAKMUR JAYA	41,55
26	BETARA	SERDANG JAYA	27,59
27	BETARA	TERJUN GAJAH	24,39
28	BETARA	LUBUK TERENTANG	34,30
29	BETARA	PEMATANG BULUH	37,76
30	BETARA	MUNTIALO	29,70
31	BETARA	TELUK KULBI	48,10
32	BETARA	BUNGA TANJUNG	33,37
33	BETARA	SUNGAI TERAP	53,55
34	BETARA	MANDALA JAYA	35,80

35	MERLUNG	PENYABUNGAN	35,01
36	MERLUNG	LUBUK TERAP	52,51
37	MERLUNG	TANJUNG PAKU	58,54
38	MERLUNG	TANJUNG BENANAK	36,77
39	MERLUNG	BUKIT HARAPAN	38,95
40	MERLUNG	ADI PURWA	42,40
41	MERLUNG	PINANG GADING	40,04
42	MERLUNG	MERLUNG	25,25
43	MERLUNG	TANJUNG MAKMUR	61,04
44	TEBING TINGGI	PURWODADI	18,76
45	TEBING TINGGI	SUKA DAMAI	26,02
46	TEBING TINGGI	ADI JAYA	39,96
47	TEBING TINGGI	KELAGIAN	43,87
48	TEBING TINGGI	TELUK PENGKAH	62,11
49	TEBING TINGGI	TALANG MAKMUR	41,93
50	TEBING TINGGI	SUNGAI KERUH	37,75
51	TEBING TINGGI	DATARAN KEMPAS	35,14
52	TEBING TINGGI	DELIMA	28,60
53	BATANG ASAM	SRI AGUNG	42,28
54	BATANG ASAM	SUBAN	38,85
55	BATANG ASAM	TANJUNG BOJO	46,28
56	BATANG ASAM	KAMPUNG BARU	35,44
57	BATANG ASAM	LUBUK BERNAI	45,73
58	BATANG ASAM	RAWA MEDANG	54,26
59	BATANG ASAM	SUNGAI PENOBAN	53,03
60	BATANG ASAM	RAWANG KEMPAS	63,12
61	BATANG ASAM	LUBUK LAWAS	58,49
62	BATANG ASAM	SUNGAI BADAR	52,30
63	RENAH MENDALUH	PULAU PAUH	42,65
64	RENAH MENDALUH	RANTAU BENAR	46,21
65	RENAH MENDALUH	LAMPISI	38,03
66	RENAH MENDALUH	CINTA DAMAI	44,52
67	RENAH MENDALUH	SUNGAI ROTAN	55,02
68	RENAH MENDALUH	MUARA DANAU	61,94
69	RENAH MENDALUH	TANAH TUMBUH	57,72
70	RENAH MENDALUH	SUNGAI PAUR	67,48
71	RENAH MENDALUH	BUKIT BAKAR	70,95
72	MUARA PAPALIK	DUSUN MUDO	32,23
73	MUARA PAPALIK	INTAN JAYA	38,06
74	MUARA PAPALIK	BUKIT INDAH	38,43
75	MUARA PAPALIK	KEMANG MANIS	40,87
76	MUARA PAPALIK	RANTAU BADAQ LAMO	28,92
77	MUARA PAPALIK	LUBUK SEBONTAN	57,43
78	MUARA PAPALIK	SUNGAI PAPAUH	57,02
79	MUARA PAPALIK	SUNGAI MULUK	60,08
80	MUARA PAPALIK	PEMATANG BALAM	56,88
81	SEBERANG KOTA	TUNGKAL IV DESA	26,27
82	SEBERANG KOTA	KUALA BARU	39,14
83	SEBERANG KOTA	TELUK PULAI RAYA	30,02
84	SEBERANG KOTA	MEKAR ALAM	36,52

85	SEBERANG KOTA	HARAPAN JAYA	47,73
86	SEBERANG KOTA	KUALA KAHAR	44,12
87	SEBERANG KOTA	MUARA SEBERANG	35,79
88	BRAM ITAM	BRAM ITAM KANAN	52,68
89	BRAM ITAM	TANJUNG SENJULANG	44,62
90	BRAM ITAM	PEMBENGIS	21,85
91	BRAM ITAM	BRAM ITAM RAYA	25,86
92	BRAM ITAM	PANTAI GADING	53,42
93	BRAM ITAM	JATI EMAS	41,32
94	BRAM ITAM	KEMUNING	52,65
95	BRAM ITAM	MEKAR TANJUNG	62,60
96	BRAM ITAM	SEMAU	39,94
97	KUALA BETARA	SUNGAI DUALAP	42,82
98	KUALA BETARA	BETARA KANAN	37,85
99	KUALA BETARA	SUNGAI GEBAR	45,09
100	KUALA BETARA	DATARAN PINANG	69,46
101	KUALA BETARA	TANJUNG PASIR	34,72
102	KUALA BETARA	SUNGAI GEBAR BARAT	37,04
103	KUALA BETARA	SUNGAI DUNGUN	36,15
104	KUALA BETARA	KUALA INDAH	42,49
105	KUALA BETARA	SUAK LABU	48,43
106	SENYERANG	SUNGAI KAYU ARO	46,91
107	SENYERANG	TELUK KETAPANG	41,58
108	SENYERANG	SUNGAI RAMBAI	37,70
109	SENYERANG	MARGO RUKUN	45,53
110	SENYERANG	KEMPAS JAYA	49,60
111	SENYERANG	LUMAHAN	43,23
112	SENYERANG	SUNGAI LANDAK	62,82
113	SENYERANG	SUNGSANG	65,12
114	SENYERANG	SUNGAI KEPAYANG	65,02
JUMLAH			4.994

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN, PENGGUNAAN,
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kerja					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan....					
2.1.2	Kegiatan....					
2.1.3	Dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan jalan Desa					
	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan..					
2.3.2	Kegiatan...					
3.3.3	Dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan....					
	Jumlah				Rp.	

Keterangan:
 SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Bendahara Desa ...

(.....)

Disetujui oleh
 Kepala Desa.....

(.....)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

LAPORAN REALISASI PENYALURAN
 KABUPATEN
 TAHUN ANGGARAN.....

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			Nomor SP2D	Tgl Penyaluran	Jumlah	Nomor SP2D	Tgl Penyaluran	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DESA Penyaluran Pertama Penyaluran kedua	1000	01/BUD/2015 02/BUD/2015	31-mar 2-Apr	600 400 200	01/BUD/2015 02/BUD/2015	31-aug 2-sep	400 200 200	1000	0	100%
2	DESA penyaluran Pertama Penyaluran kedua Dan seterusnya ...	2000	01/BUD/2015 02/BUD/2015	31-mar 2-Apr	1200 500 700	01/BUD/2015 02/BUD/2015	31-aug 2-sep	700 400 300	1900	100	95%
	JUMLAH TOTAL	3000			1800			11000	2900	100	97%

Keterangan kolom

- 3 Pagu yang diterima oleh Desa
- 6 Di isi jumlah penyaluran ke Desa
- 9 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 10 Penjumlahan kolom 6 dankolom 9
- 11 Kolom 3 di kurang kolom 10
- 12 Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
 KABUPATEN.....
 TAHUN ANGGARAN....

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan							
1	Desa	1000	200	400	300	100	1000	-
2	Desa	2000	300	800	600	100	1800	200
	Jumlah Kecamatan	3000	500	1200	900	200	2800	200
1	Desa							
2	Desa							

Keterangan Kolom

- 3 Di isi Pagu dana Desa yang diterima Desa
 4,5,6,7 Di isi jumlah belanja perbidang
 8 Total Belanja
 9 Di isi pengurangan kolom 3 di kurangi kolom 8

 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Jln.A. Majid Brangas No. 02 Telp.(0742) 322733
Email : DPMDkab.tanjabbar@yahoo.com Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL*

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MELALUI : YTH. BAPAK SEKDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
DARI : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 141/ /PD/PMD/2017
TANGGAL : JANUARI 2017
PERIHAL : MOHON MENANDATANGANI PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak kiranya dapat menandatangani Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya akan kami pedomani dan laksanakan.

KEPALA DINAS,

H. MULYADI, S.Pd, M.Kes

Pembina Tk.I

NIP. 19650110 198903 1 011

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN DANA DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu DD per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	TUNGKAL ULU	BADANG	720,442,000	557	0.003	0.07%	34	0.001	0.05%	49.40	0.013	0.13%	33.83	0.007	0.20%	0.45%	37,304,768	757,747,000
2	TUNGKAL ULU	TANJUNGTAYAS	720,442,000	977	0.005	0.12%	15	0.001	0.02%	22.03	0.006	0.06%	37.90	0.008	0.23%	0.43%	35,498,264	755,940,000
3	TUNGKAL ULU	KUALA DASAL	720,442,000	2545	0.013	0.32%	63	0.003	0.10%	13.51	0.003	0.03%	44.50	0.009	0.27%	0.72%	59,434,867	779,877,000
4	TUNGKAL ULU	PEMATANG PAUH	720,442,000	1158	0.006	0.15%	13	0.001	0.02%	11.59	0.003	0.03%	46.13	0.009	0.28%	0.47%	38,988,659	759,431,000
5	TUNGKAL ULU	TAMAN RAJA	720,442,000	2365	0.012	0.30%	74	0.003	0.11%	96.89	0.025	0.25%	32.25	0.006	0.19%	0.86%	70,561,481	791,003,000
6	TUNGKAL ULU	BRASAU	720,442,000	1060	0.005	0.13%	69	0.003	0.11%	7.33	0.002	0.02%	34.24	0.007	0.21%	0.47%	38,294,661	758,737,000
7	TUNGKAL ULU	GEMURUH	720,442,000	588	0.003	0.07%	14	0.001	0.02%	20.33	0.005	0.05%	38.34	0.008	0.23%	0.38%	31,159,878	751,602,000
8	TUNGKAL ULU	PEMATANG TEMBESU	720,442,000	1055	0.005	0.13%	33	0.001	0.05%	66.84	0.017	0.17%	43.23	0.009	0.26%	0.62%	50,724,397	771,166,000
9	TUNGKAL ULU	BADANG SEPAKAT	720,442,000	580	0.003	0.07%	32	0.001	0.05%	35.26	0.009	0.09%	63.56	0.013	0.38%	0.60%	48,979,201	769,421,000
10	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL I	720,442,000	2146	0.011	0.27%	419	0.018	0.65%	44.15	0.011	0.11%	41.70	0.008	0.25%	1.28%	105,531,972	825,974,000
11	TUNGKAL ILIR	TELUKSIALANG	720,442,000	2174	0.011	0.28%	373	0.016	0.58%	24.95	0.006	0.06%	32.21	0.006	0.19%	1.11%	91,233,189	811,675,000
12	PENGABUAN	PARIT PUDIN	720,442,000	3034	0.015	0.39%	705	0.031	1.09%	52.60	0.014	0.14%	33.50	0.007	0.20%	1.81%	148,836,254	869,278,000
13	PENGABUAN	SUNGAISERINDIT	720,442,000	2053	0.010	0.26%	486	0.021	0.75%	6.68	0.002	0.02%	36.84	0.007	0.22%	1.25%	102,723,365	823,165,000
14	PENGABUAN	MEKAR JATI	720,442,000	1707	0.009	0.22%	168	0.007	0.26%	19.18	0.005	0.05%	49.23	0.010	0.30%	0.82%	67,528,572	787,971,000
15	PENGABUAN	SUNGAIPAMPANG	720,442,000	961	0.005	0.12%	207	0.009	0.32%	15.00	0.004	0.04%	40.47	0.008	0.24%	0.72%	59,464,699	779,907,000
16	PENGABUAN	PARIT SIDANG	720,442,000	1023	0.005	0.13%	221	0.010	0.34%	7.21	0.002	0.02%	39.70	0.008	0.24%	0.73%	59,859,164	780,301,000
17	PENGABUAN	SUNGAIJERING	720,442,000	1341	0.007	0.17%	289	0.013	0.45%	11.14	0.003	0.03%	55.96	0.011	0.34%	0.98%	80,674,654	801,117,000
18	PENGABUAN	PARIT BILAL	720,442,000	913	0.005	0.12%	197	0.009	0.30%	26.67	0.007	0.07%	60.26	0.012	0.36%	0.85%	69,943,085	790,385,000
19	PENGABUAN	SUAKSAMIN	720,442,000	1123	0.006	0.14%	242	0.011	0.37%	56.76	0.015	0.15%	50.41	0.010	0.30%	0.97%	79,359,630	799,802,000
20	PENGABUAN	SUNGAIBAUNG	720,442,000	1745	0.009	0.22%	406	0.018	0.63%	75.93	0.020	0.20%	42.13	0.008	0.25%	1.30%	106,637,348	827,079,000
21	PENGABUAN	KARYA MAJU	720,442,000	2482	0.013	0.32%	577	0.025	0.89%	51.85	0.013	0.13%	49.81	0.010	0.30%	1.64%	134,723,164	855,165,000
22	PENGABUAN	SUNGAIRAYA	720,442,000	1279	0.007	0.16%	304	0.013	0.47%	8.40	0.002	0.02%	56.42	0.011	0.34%	0.99%	81,573,395	802,015,000
23	PENGABUAN	PASAR SENIN	720,442,000	1510	0.008	0.19%	149	0.007	0.23%	15.22	0.004	0.04%	29.54	0.006	0.18%	0.64%	52,496,062	772,938,000
24	BETARA	PEMATANG LUMUT	720,442,000	3114	0.016	0.40%	291	0.013	0.45%	64.77	0.017	0.17%	20.22	0.004	0.12%	1.13%	93,175,358	813,617,000
25	BETARA	MAKAMUR JAYA	720,442,000	1598	0.008	0.20%	416	0.018	0.64%	16.95	0.004	0.04%	41.55	0.008	0.25%	1.14%	93,584,059	814,026,000
26	BETARA	SERDANG JAYA	720,442,000	2540	0.013	0.32%	346	0.015	0.53%	41.80	0.011	0.11%	27.59	0.006	0.17%	1.13%	92,921,543	813,364,000
27	BETARA	TERJUN GAJAH	720,442,000	2159	0.011	0.27%	202	0.009	0.31%	40.19	0.010	0.10%	24.39	0.005	0.15%	0.84%	68,755,211	789,197,000
28	BETARA	LUBUK TERENTANG	720,442,000	1647	0.008	0.21%	154	0.007	0.24%	57.87	0.015	0.15%	34.30	0.007	0.21%	0.80%	65,950,682	786,393,000
29	BETARA	PEMATANG BULUH	720,442,000	839	0.004	0.11%	78	0.003	0.12%	90.82	0.023	0.23%	37.76	0.008	0.23%	0.69%	56,554,535	776,997,000
30	BETARA	MUNTIALO	720,442,000	1223	0.006	0.16%	167	0.007	0.26%	87.09	0.022	0.22%	29.70	0.006	0.18%	0.82%	67,085,745	787,528,000
31	BETARA	TELUKKULBI	720,442,000	2088	0.011	0.27%	285	0.013	0.44%	36.39	0.009	0.09%	48.10	0.010	0.29%	1.09%	89,443,905	809,886,000
32	BETARA	BUNGA TANJUNG	720,442,000	3600	0.018	0.46%	733	0.032	1.13%	26.85	0.007	0.07%	33.37	0.007	0.20%	1.86%	152,787,970	873,230,000
33	BETARA	SUNGAITERAP	720,442,000	1445	0.007	0.18%	376	0.017	0.58%	37.98	0.010	0.10%	53.55	0.011	0.32%	1.18%	97,293,689	817,736,000

34	BETARA	MANDALA JAYA	720,442,000	1043	0.005	0.13%	142	0.006	0.22%	22.95	0.006	0.06%	35.80	0.007	0.22%	0.63%	51,457,427	771,899,000
35	MERLUNG	PENYABUNGAN	720,442,000	990	0.005	0.13%	54	0.002	0.08%	43.66	0.011	0.11%	35.01	0.007	0.21%	0.53%	43,737,632	764,180,000
36	MERLUNG	LUBUK TERAP	720,442,000	811	0.004	0.10%	27	0.001	0.04%	58.51	0.015	0.15%	52.51	0.011	0.32%	0.61%	50,230,197	770,672,000
37	MERLUNG	TANJUNGPAKU	720,442,000	884	0.004	0.11%	86	0.004	0.13%	64.39	0.017	0.17%	58.54	0.012	0.35%	0.76%	62,699,184	783,141,000
38	MERLUNG	TANJUNGBENANAK	720,442,000	886	0.005	0.11%	2	0.000	0.00%	6.59	0.002	0.02%	36.77	0.007	0.22%	0.35%	29,070,118	749,512,000
39	MERLUNG	BUKITHARAPAN	720,442,000	1616	0.008	0.21%	12	0.001	0.02%	9.61	0.002	0.02%	38.95	0.008	0.23%	0.48%	39,681,478	760,123,000
40	MERLUNG	ADI PURWA	720,442,000	1323	0.007	0.17%	23	0.001	0.04%	13.86	0.004	0.04%	42.40	0.008	0.25%	0.49%	40,623,857	761,066,000
41	MERLUNG	PINANG GADING	720,442,000	959	0.005	0.12%	15	0.001	0.02%	11.42	0.003	0.03%	40.04	0.008	0.24%	0.42%	34,119,853	754,563,000
42	MERLUNG	MERLUNG	720,442,000	5519	0.028	0.70%	75	0.003	0.12%	25.52	0.007	0.07%	25.25	0.005	0.15%	1.04%	85,081,684	805,524,000
43	MERLUNG	TANJUNGMAKMUR	720,442,000	713	0.004	0.09%	2	0.000	0.00%	5.68	0.001	0.01%	61.04	0.012	0.37%	0.48%	39,051,019	759,493,000
44	TEBING TINGGI	PURWODADI	720,442,000	5702	0.029	0.73%	86	0.004	0.13%	26.21	0.007	0.07%	18.76	0.004	0.11%	1.04%	85,331,632	805,774,000
45	TEBING TINGGI	SUKA DAMAI	720,442,000	1648	0.008	0.21%	72	0.003	0.11%	16.40	0.004	0.04%	26.02	0.005	0.16%	0.52%	42,684,562	763,127,000
46	TEBING TINGGI	ADI JAYA	720,442,000	1237	0.006	0.16%	54	0.002	0.08%	12.29	0.003	0.03%	39.96	0.008	0.24%	0.51%	42,115,403	762,557,000
47	TEBING TINGGI	KELAGIAN	720,442,000	3065	0.016	0.39%	542	0.024	0.84%	87.69	0.023	0.23%	43.87	0.009	0.26%	1.72%	141,035,543	861,478,000
48	TEBING TINGGI	TELUKPENGAH	720,442,000	4123	0.021	0.52%	80	0.004	0.12%	32.83	0.008	0.08%	62.11	0.012	0.37%	1.11%	90,871,617	811,314,000
49	TEBING TINGGI	TALANG MAKMUR	720,442,000	4138	0.021	0.53%	81	0.004	0.13%	9.18	0.002	0.02%	41.93	0.008	0.25%	0.93%	76,182,556	796,625,000
50	TEBING TINGGI	SUNGAIKERUH	720,442,000	501	0.003	0.06%	8	0.000	0.01%	4.15	0.001	0.01%	37.75	0.008	0.23%	0.31%	25,773,817	746,216,000
51	TEBING TINGGI	DATARAN KEMPAS	720,442,000	1610	0.008	0.20%	24	0.001	0.04%	1.31	0.000	0.00%	35.14	0.007	0.21%	0.46%	37,506,866	757,949,000
52	TEBING TINGGI	DELIMA	720,442,000	1248	0.006	0.16%	19	0.001	0.03%	4.94	0.001	0.01%	28.60	0.006	0.17%	0.37%	30,624,069	751,066,000
53	BATANG ASAM	SRI AGUNG	720,442,000	2867	0.015	0.36%	221	0.010	0.34%	8.71	0.002	0.02%	42.28	0.008	0.25%	0.98%	80,728,415	801,170,000
54	BATANG ASAM	SUBAN	720,442,000	8332	0.042	1.06%	404	0.018	0.62%	96.97	0.025	0.25%	38.85	0.008	0.23%	2.17%	178,076,554	898,519,000
55	BATANG ASAM	TANJUNGBORO	720,442,000	1151	0.006	0.15%	57	0.003	0.09%	36.31	0.009	0.09%	46.28	0.009	0.28%	0.61%	49,809,561	770,252,000
56	BATANG ASAM	KAMPUNG BARU	720,442,000	3355	0.017	0.43%	113	0.005	0.17%	30.33	0.008	0.08%	35.44	0.007	0.21%	0.89%	73,330,603	793,773,000
57	BATANG ASAM	LUBUK BERNAI	720,442,000	5484	0.028	0.70%	80	0.004	0.12%	135.98	0.035	0.35%	45.73	0.009	0.27%	1.45%	118,862,674	839,305,000
58	BATANG ASAM	RAWAMENDANG	720,442,000	2354	0.012	0.30%	181	0.008	0.28%	10.16	0.003	0.03%	54.26	0.011	0.33%	0.93%	76,516,576	796,959,000
59	BATANG ASAM	SUNGAIPENOBAN	720,442,000	1831	0.009	0.23%	89	0.004	0.14%	18.21	0.005	0.05%	53.03	0.011	0.32%	0.74%	60,473,626	780,916,000
60	BATANG ASAM	RAWANGKEMPAS	720,442,000	910	0.005	0.12%	44	0.002	0.07%	54.12	0.014	0.14%	63.12	0.013	0.38%	0.70%	57,729,015	778,171,000
61	BATANG ASAM	LUBUK LAWAS	720,442,000	635	0.003	0.08%	9	0.000	0.01%	27.76	0.007	0.07%	58.49	0.012	0.35%	0.52%	42,541,117	762,983,000
62	BATANG ASAM	SUNGAIBADAR	720,442,000	854	0.004	0.11%	25	0.001	0.04%	14.81	0.004	0.04%	52.30	0.010	0.31%	0.50%	41,061,569	761,504,000
63	RENAH MENDALUH	PULAUPAUH	720,442,000	1062	0.005	0.14%	178	0.008	0.27%	32.42	0.008	0.08%	42.65	0.009	0.26%	0.75%	61,612,534	782,055,000
64	RENAH MENDALUH	RANTAU BENAR	720,442,000	2160	0.011	0.27%	111	0.005	0.17%	36.86	0.010	0.10%	46.21	0.009	0.28%	0.82%	67,287,894	787,730,000
65	RENAH MENDALUH	LAMPISI	720,442,000	2590	0.013	0.33%	55	0.002	0.08%	48.85	0.013	0.13%	38.03	0.008	0.23%	0.77%	63,178,869	783,621,000
66	RENAH MENDALUH	CINTA DAMAI	720,442,000	1303	0.007	0.17%	26	0.001	0.04%	38.19	0.010	0.10%	44.52	0.009	0.27%	0.57%	46,994,398	767,436,000
67	RENAH MENDALUH	SUNGAIROATAN	720,442,000	1411	0.007	0.18%	50	0.002	0.08%	51.78	0.013	0.13%	55.02	0.011	0.33%	0.72%	59,231,647	779,674,000
68	RENAH MENDALUH	MUARADANAU	720,442,000	822	0.004	0.10%	230	0.010	0.35%	170.75	0.044	0.44%	61.94	0.012	0.37%	1.27%	104,531,376	824,973,000
69	RENAH MENDALUH	TANAHTUMBUH	720,442,000	739	0.004	0.09%	207	0.009	0.32%	13.14	0.003	0.03%	57.72	0.012	0.35%	0.79%	65,270,320	785,712,000
70	RENAH MENDALUH	SUNGAIPAUR	720,442,000	1625	0.008	0.21%	455	0.020	0.70%	39.24	0.010	0.10%	67.48	0.014	0.41%	1.42%	116,341,696	836,784,000
71	RENAH MENDALUH	BUKITBAKAR	720,442,000	600	0.003	0.08%	168	0.007	0.26%	40.32	0.010	0.10%	70.95	0.014	0.43%	0.87%	71,163,375	791,605,000
72	MUARA PAPALIK	DUSUN MUDO	720,442,000	3265	0.017	0.42%	67	0.003	0.10%	202.07	0.052	0.52%	32.23	0.006	0.19%	1.23%	101,356,624	821,799,000
73	MUARA PAPALIK	INTAN JAYA	720,442,000	997	0.005	0.13%	2	0.000	0.00%	6.85	0.002	0.02%	38.06	0.008	0.23%	0.38%	30,921,057	751,363,000
74	MUARA PAPALIK	BUKIT INDAH	720,442,000	1029	0.005	0.13%	3	0.000	0.00%	5.28	0.001	0.01%	38.43	0.008	0.23%	0.38%	31,233,154	751,675,000
75	MUARA PAPALIK	KEMANG MANIS	720,442,000	1053	0.005	0.13%	12	0.001	0.02%	7.07	0.002	0.02%	40.87	0.008	0.25%	0.42%	34,210,327	754,652,000
76	MUARA PAPALIK	RANTAU BADAQ LAMO	720,442,000	1332	0.007	0.17%	46	0.002	0.07%	77.14	0.020	0.20%	28.92	0.006	0.17%	0.61%	50,382,903	770,825,000
77	MUARA PAPALIK	LUBUK SEBONTAN	720,442,000	608	0.003	0.08%	12	0.001	0.02%	16.60	0.004	0.04%	57.43	0.012	0.35%	0.48%	39,754,238	760,196,000
78	MUARA PAPALIK	SUNGAIPAPAUH	720,442,000	752	0.004	0.10%	2	0.000	0.00%	4.47	0.001	0.01%	57.02	0.011	0.34%	0.45%	37,219,980	757,662,000
79	MUARA PAPALIK	SUNGAIMULUK	720,442,000	1138	0.006	0.14%	3	0.000	0.00%	6.04	0.002	0.02%	60.08	0.012	0.36%	0.53%	43,225,974	763,668,000
80	MUARA PAPALIK	PEMATANG BALAM	720,442,000	650	0.003	0.08%	7	0.000	0.01%	4.25	0.001	0.01%	56.88	0.011	0.34%	0.45%	36,671,049	757,113,000
81	SEBERANG KOTA	TUNGKAL IV DESA	720,442,000	1016	0.005	0.13%	268	0.012	0.41%	10.45	0.003	0.03%	26.27	0.005	0.16%	0.73%	59,803,789	780,246,000
82	SEBERANG KOTA	KUALA BARU	720,442,000	928	0.005	0.12%	241	0.011	0.37%	6.92	0.002	0.02%	39.14	0.008	0.24%	0.74%	61,066,223	781,508,000
83	SEBERANG KOTA	TELUKPULAI RAYA	720,442,000	1925	0.010	0.24%	482	0.021	0.74%	15.69	0.004	0.04%	30.02	0.006	0.18%	1.21%	99,417,562	819,860,000

84	SEBERANG KOTA	MEKAR ALAM	720,442,000	870	0.004	0.11%	283	0.012	0.44%	18.63	0.005	0.05%	36.52	0.007	0.22%	0.81%	66,976,259	787,418,000
85	SEBERANG KOTA	HARAPAN JAYA	720,442,000	1167	0.006	0.15%	380	0.017	0.59%	9.66	0.002	0.02%	47.73	0.010	0.29%	1.05%	86,022,004	806,464,000
86	SEBERANG KOTA	KUALA KAHAR	720,442,000	799	0.004	0.10%	261	0.012	0.40%	5.11	0.001	0.01%	44.12	0.009	0.27%	0.78%	64,331,811	784,774,000
87	SEBERANG KOTA	MUARASEBERANG	720,442,000	910	0.005	0.12%	237	0.010	0.37%	19.50	0.005	0.05%	35.79	0.007	0.22%	0.75%	61,384,053	781,826,000
88	BRAM ITAM	BRAM ITAM KANAN	720,442,000	2207	0.011	0.28%	264	0.012	0.41%	4.09	0.001	0.01%	52.68	0.011	0.32%	1.02%	83,441,346	803,883,000
89	BRAM ITAM	TANJUNGSENUJULANG	720,442,000	732	0.004	0.09%	203	0.009	0.31%	4.36	0.001	0.01%	44.62	0.009	0.27%	0.69%	56,359,244	776,801,000
90	BRAM ITAM	PEMBENGIS	720,442,000	3100	0.016	0.39%	686	0.030	1.06%	8.02	0.002	0.02%	21.85	0.004	0.13%	1.60%	131,919,629	852,362,000
91	BRAM ITAM	BRAM ITAM RAYA	720,442,000	2682	0.014	0.34%	591	0.026	0.91%	6.19	0.002	0.02%	25.86	0.005	0.16%	1.42%	117,090,968	837,533,000
92	BRAM ITAM	PANTAIGADING	720,442,000	806	0.004	0.10%	97	0.004	0.15%	4.53	0.001	0.01%	53.42	0.011	0.32%	0.58%	48,068,158	768,510,000
93	BRAM ITAM	JATI EMAS	720,442,000	1030	0.005	0.13%	123	0.005	0.19%	3.95	0.001	0.01%	41.32	0.008	0.25%	0.58%	47,611,616	768,054,000
94	BRAM ITAM	KEMUNING	720,442,000	935	0.005	0.12%	112	0.005	0.17%	3.91	0.001	0.01%	52.65	0.011	0.32%	0.62%	50,811,942	771,254,000
95	BRAM ITAM	MEKAR TANJUNG	720,442,000	742	0.004	0.09%	205	0.009	0.32%	20.58	0.005	0.05%	62.60	0.013	0.38%	0.84%	69,033,905	789,476,000
96	BRAM ITAM	SEMAU	720,442,000	866	0.004	0.11%	148	0.007	0.23%	10.71	0.003	0.03%	39.94	0.008	0.24%	0.61%	49,816,342	770,258,000
97	KUALA BETARA	SUNGAIDUALAP	720,442,000	1503	0.008	0.19%	380	0.017	0.59%	22.84	0.006	0.06%	42.82	0.009	0.26%	1.09%	89,900,988	810,343,000
98	KUALA BETARA	BETARA KANAN	720,442,000	1331	0.007	0.17%	291	0.013	0.45%	1.73	0.000	0.00%	37.85	0.008	0.23%	0.85%	69,884,485	790,326,000
99	KUALA BETARA	SUNGAIGEBAR	720,442,000	907	0.005	0.12%	194	0.009	0.30%	51.97	0.013	0.13%	45.09	0.009	0.27%	0.82%	67,368,603	787,811,000
100	KUALA BETARA	DATARAN PINANG	720,442,000	1345	0.007	0.17%	265	0.012	0.41%	27.79	0.007	0.07%	69.46	0.014	0.42%	1.07%	87,862,595	808,305,000
101	KUALA BETARA	TANJUNGPASIR	720,442,000	1794	0.009	0.23%	354	0.016	0.55%	23.95	0.006	0.06%	34.72	0.007	0.21%	1.04%	85,880,231	806,322,000
102	KUALA BETARA	SUNGAIGEBAR BARAT	720,442,000	1068	0.005	0.14%	228	0.010	0.35%	20.13	0.005	0.05%	37.04	0.007	0.22%	0.76%	62,641,649	783,084,000
103	KUALA BETARA	SUNGAIDUNGUN	720,442,000	1175	0.006	0.15%	296	0.013	0.46%	14.28	0.004	0.04%	36.15	0.007	0.22%	0.86%	70,708,536	791,151,000
104	KUALA BETARA	KUALA INDAH	720,442,000	836	0.004	0.11%	182	0.008	0.28%	8.46	0.002	0.02%	42.49	0.009	0.26%	0.66%	54,603,756	775,046,000
105	KUALA BETARA	SUAK LABU	720,442,000	1146	0.006	0.15%	298	0.013	0.46%	27.22	0.007	0.07%	48.43	0.010	0.29%	0.97%	79,462,092	799,904,000
106	SENYERANG	SUNGAIKAYU ARO	720,442,000	2439	0.012	0.31%	306	0.013	0.47%	233.05	0.060	0.60%	46.91	0.009	0.28%	1.67%	136,853,185	857,295,000
107	SENYERANG	TELUKKETAPANG	720,442,000	2011	0.010	0.26%	310	0.014	0.48%	105.53	0.027	0.27%	41.58	0.008	0.25%	1.26%	103,239,671	823,682,000
108	SENYERANG	SUNGAIRAMBAI	720,442,000	3631	0.018	0.46%	297	0.013	0.46%	20.43	0.005	0.05%	37.70	0.008	0.23%	1.20%	98,576,186	819,018,000
109	SENYERANG	MARGO RUKUN	720,442,000	2520	0.013	0.32%	424	0.019	0.65%	58.46	0.015	0.15%	45.53	0.009	0.27%	1.40%	114,999,462	835,441,000
110	SENYERANG	KEMPAS JAYA	720,442,000	3449	0.018	0.44%	416	0.018	0.64%	12.72	0.003	0.03%	49.60	0.010	0.30%	1.41%	116,014,118	836,456,000
111	SENYERANG	LUMAHAN	720,442,000	1984	0.010	0.25%	577	0.025	0.89%	56.59	0.015	0.15%	43.23	0.009	0.26%	1.55%	127,272,429	847,714,000
112	SENYERANG	SUNGAILANDAK	720,442,000	2442	0.012	0.31%	577	0.025	0.89%	94.54	0.024	0.24%	62.82	0.013	0.38%	1.82%	149,773,626	870,214,400
113	SENYERANG	SUNGSANG	720,442,000	1623	0.008	0.21%	133	0.006	0.21%	14.05	0.004	0.04%	65.12	0.013	0.39%	0.84%	68,971,873	789,414,373
114	SENYERANG	SUNGAIKEPAYANG	720,442,000	1099	0.006	0.14%	169	0.007	0.26%	2.01	0.001	0.01%	65.02	0.013	0.39%	0.80%	65,457,595	785,895,227
JUMLAH			82,130,388,000	196,572	1	25%	22,677	1	35%	3,880	1	10%	4,994	1	30%	1	8,219,305,000	90,349,693,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD Kabupaten	90,349,693,000 ^(c)
Hasil Perhitungan Pagu DD Kabupaten	90,349,693,000 ^(d)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	82,130,388,000 ^(e)
Total Pagu Alokasi Dasar (90%)	82,130,388,000 ^(f)
Pagu Bagian Formula (10%)	8,219,305,000 ^(g)
Total Pagu Bagian Formula (10%)	8,219,305,000 ^(h)
Jumlah Desa	114 ⁽ⁱ⁾

Bobot	
JP	25% ^(j)
AK	35% ^(k)
LW	10% ^(l)
IKG	30% ^(m)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL